

Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)

M. Badri ^{a)}, M. Hubeis ^{b)}, Maksu ^{b)}

^{a)} Alumni Mayor Komunikasi Pembangunan ^{b)} Staf Pengajar Mayor Komunikasi Pembangunan,
FEMA IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga

Abstrak

This research is aimed at knowing communication empowerment for opinion leaders in the post-disaster handling of the Yogyakarta earthquake, especially in Bantul Regency. The analysis was held to find out the opinion leader's personal characteristics, opinion leader's communication behavior, community group, opinion leader's communication empowerment in the post-disaster handling and also the influence of the opinion leader's personal characteristics, opinion leader's communication behavior, community group, for opinion leader's communication empowerment in the post-disaster handling of the Yogyakarta earthquake. This research was designed as survey methods, using simple random sampling methods for 91 respondents. The analysis was done by descriptive frequency, Chi-Square and multiple regression. The result shown that opinion leader's occupation has influence to the basic social service in the opinion leader's communication empowerment in disaster handling. Opinion leader's salary has influence to the program information. Personage has influence to the basic social service. Opinion leader's responses to mass media has influence to the victim rescue stage. Community group has real influence to the empowerment disaster handling communication. Group structure occupation has strong influence to the temporary housing. Group building has strong influence to the reconstruction housing. Group cohesion has strong influence to all activity of the empowerment disaster handling communication. Group atmosphere has strong influence to the temporary housing. Group pressure influence to the mental rehabilitation only. Group direction has strong influence to the temporary housing. The communication empowerment for opinion leaders is necessary to make the post-disaster handling program successful.

Keyword: *communication empowerment; opinion leaders; disaster handling; earthquake.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, badai dan banjir. Bencana tersebut datang hampir setiap tahun, yang terbesar antara lain gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 26 Desember 2004, serta gempa bumi di Yogyakarta 27 Mei 2006. Bencana alam geologis yang sering terjadi yaitu gempa bumi, merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi kedatangannya sampai sekarang. Indonesia sangat rawan gempa karena dekat dengan lempeng-lempeng aktif yang saling berhubungan satu sama lain dan karena adanya gunung-gunung berapi aktif.

Berbagai permasalahan sering muncul dalam penanganan bencana, yang

menunjukkan bahwa negara ini tidak siap menghadapi musibah tersebut. Hal itu disebabkan Indonesia belum memiliki manajemen penanggulangan bencana yang baik. Sebagai contoh, penanganan bencana di NAD terdapat kelemahan dalam proses komunikasi dan informasi yang mengakibatkan koordinasi penanganannya menjadi tumpang tindih. Padahal jika sejak awal pemerintah didukung semua elemen masyarakat dapat mempergunakan sarana komunikasi yang memadai, niscaya hal tersebut tidak akan terjadi. Masalah komunikasi dalam penanganan tragedi tsunami cukup vital karena menyangkut komunikasi dalam penanganan internal bencana dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat (Suryo, 2005).

Buruknya komunikasi dan koordinasi penanganan bencana NAD tersebut berdampak terhadap belum tertatanya

mekanisme transisi ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di ujung fase tanggap darurat pada 25 Maret 2005 (BRR NAD-Nias, 2005). Kondisi tersebut kemudian membuka kesadaran bersama bahwa manajemen bencana di Indonesia masih jauh dari harapan. Pemahaman terhadap manajemen bencana selama ini terabaikan dan dianggap bukan prioritas karena bencana hanya datang sewaktu-waktu. Berdasarkan pengalaman tersebut maka pemerintah dan masyarakat perlu memiliki kesadaran membangun kerjasama dalam manajemen bencana melalui komunikasi yang efektif, terutama dalam penanganan pasca bencana.

Bencana alam terbesar setelah tsunami di NAD dan Nias yaitu gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta. Data *Media Center* Pemda DIY menyebutkan jumlah korban di Yogyakarta sebanyak 4.715 orang meninggal dunia, 19.381 orang luka berat, dan 8.422 orang luka ringan. Kemudian 109.100 rumah rusak berat dan roboh, 123.930 rumah rusak sedang, dan 174.988 rumah rusak ringan. Untuk fasilitas umum 1.180 tempat ibadah, 2378 sekolah, dan 216 bangunan pemerintah mengalami kerusakan baik berat maupun ringan. Dari lima Kabupaten/Kota yang ada di Yogyakarta kerusakan paling parah dialami Kabupaten Bantul (Pemda DIY, 2006).

Kabupaten Bantul mengalami kerusakan paling parah karena dekat dengan pusat gempa. Dari keseluruhan jumlah korban dan kerusakan, di Kabupaten Bantul terdapat 4.280 korban meninggal dunia, 12.023 luka berat dan 28.939 bangunan roboh. Berdasarkan data tersebut dapat diasumsikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Bantul memerlukan waktu lama. Pemerintah melalui Bappenas menetapkan kebijakan penanganan bencana sampai dengan Desember 2008. Kebijakan tersebut didasarkan pada tiga program uta-

ma, yaitu (1) tanggap darurat, (2) rehabilitasi, dan (3) rekonstruksi (Bappenas, 2006).

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana diperlukan komunikasi timbal balik antara pelaksana penanganan bencana dengan pemuka pendapat. Pemuka pendapat sebagai orang yang mewakili anggota masyarakat diharapkan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pelaksana penanganan bencana. Hal ini juga dirumuskan dalam Kerangka Kerja Hyogo 2005 – 2015 (Wuryantari, 2005) yang menyebutkan bahwa baik komunitas dan pihak berwenang di tingkat lokal harus diberdayakan dalam mengelola dan meredam risiko bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumberdaya dan pihak berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi pengurangan risiko-risiko bencana.

1.2. Perumusan Masalah

Pada tahap awal penanganan pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta terdapat beberapa kelemahan antara lain ketidakjelasan peraturan pemerintah, koordinasi penanganan bencana yang lemah, munculnya pertarungan aspirasi masyarakat lokal dengan pemerintah. Dari persoalan tersebut kemudian memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten menjadi persoalan dilematis bagi pemerintah daerah. Kekecewaan warga korban bencana diluapkan kepada pemerintah daerah dengan protes dan aksi unjuk rasa (Arga, 2006).

Untuk wilayah Kabupaten Bantul yang merupakan daerah paling parah di Yogyakarta, banyak pekerjaan yang perlu segera dituntaskan untuk mendorong percepatan penanganan bencana.

Hal ini juga ditegaskan para tokoh masyarakat dan birokrat di Bantul bahwa untuk percepatan pemulihan harus ada kekuatan di dalam masyarakat untuk bangkit dan adanya sikap tidak terlalu banyak berharap terhadap bantuan dari lembaga donor (Rozaki, 2007).

Melihat permasalahan dalam penanganan bencana tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana. Pemuka pendapat adalah sumber informasi atau pendapat bagi para pengikutnya. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah karakteristik personal pemuka pendapat di Kabupaten Bantul?, (2) Bagaimanakah komunikasi pemuka pendapat di Kabupaten Bantul? (3) Bagaimanakah keragaan kelompok di Kabupaten Bantul? (4) Bagaimanakah pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul? dan (5) Seberapa besar pengaruh karakteristik personal pemuka pendapat, perilaku komunikasi pemuka pendapat dan keragaan kelompok terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui karakteristik personal pemuka pendapat di Kabupaten Bantul, (2) Mengetahui perilaku komunikasi pemuka pendapat di Kabupaten Bantul, (3) Mengetahui keragaan kelompok di Kabupaten Bantul, (4) Menetapkan faktor-faktor pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat apakah yang diperlukan dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul dan (5) Menganalisis pengaruh karakteristik personal pemuka pendapat, perilaku komunikasi pemuka pendapat dan kera-

gaan kelompok terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Komunikasi

Pengertian komunikasi secara umum dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat komunikasi terdapat kesamaan makna. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pengertian paradigmatik, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media (Effendy, 2002). Untuk memahami pengertian komunikasi secara efektif, para peminat komunikasi sering mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell. Paradigma Lasswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu komunikator (*communicator, source, sender*), pesan (*message*), media (*channel, media*), komunikan (*coomunicant, communicatee, receiver, recipient*) dan efek (*effect, impact, influence*) (Effendi, 2004).

Mulyana (2002) mencatat setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi. Sebagai tindakan satu-arah mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap-muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Komu-

nikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun perilaku nonverbalnya.

2.2. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari keinginan dan minatnya yang berkaitan dengan pengaruh dan kontrol (Suharto, 2005). Pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir dirinya sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana, 2005).

Menurut Hubeis (2001) pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas (*capacity building*) masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan sistem 3 P : *Pendampingan* yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat; *Penyuluhan* yang dapat

merespons dan memantau perubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat; dan *Pelayanan* yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non-fisik yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk konteks Indonesia saat ini, menurut Setyowati (2005) dibutuhkan strategi komunikasi sistematis berorientasi pada masyarakat dengan menyerahkan produksi, pengelolaan dan pengendalian media kepada masyarakat, sehingga aspirasi, kebutuhan dan masalahnya tercermin dalam media itu dan akan lebih banyak berkesempatan untuk memperoleh sumber-sumber komunikasi yang ada. Strategi ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan masyarakat yang paling bawah sekalipun.

2.3. Pemuka Pendapat

Di dalam suatu masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan meminta nasihat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Orang-orang tersebut mungkin menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara informal. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain seperti itu disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat, pemimpin informal atau sebutan lainnya yang sejenis (Rogers dan Shoemaker, 1981). Para pemimpin pendapat boleh jadi berasal dari tingkat sosial, ekonomi dan pekerjaan mana saja. Dalam setiap lapisan masyarakat yang berbeda, terdapat pemimpin pendapat yang berbeda (Tubbs dan Moss, 2001).

Pemuka pendapat adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Maka sepantasnya jika mempunyai karakteristik yang membedakan dirinya dengan yang lain. Beberapa karakteristik yang dimaksud

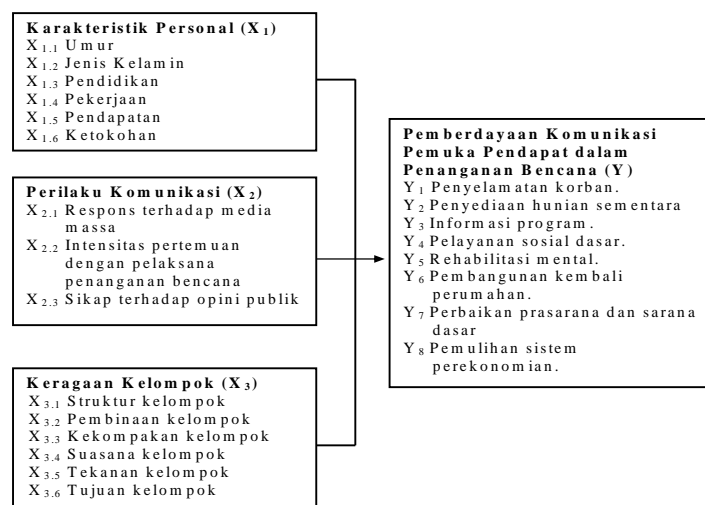
adalah (1) Lebih tinggi pendidikan formalnya dibandingkan dengan anggota masyarakat lain; (2) Lebih tinggi status sosial ekonominya; (3) Lebih inovatif dalam menerima dan mengadopsi ide baru; (4) Lebih tinggi pengenalan mediana; (5) Kemampuan empatinya lebih besar; (6) Partisipasi sosialnya lebih besar; (7) Lebih kosmopolit (mempunyai wawasan dan pengetahuan yang lebih luas) (Nurudin, 2005).

2.4. Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah sekumpulan kebijakan dan keputusan-keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan bencana. Prasetyo (2004) mengatakan pemulihan (*recovery*) kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid, bila mencoba membangun manajemen bencana (*disaster management*), agar siklus normalisasi kehidupan termasuk rehabilitasi tercapai dengan rentang waktu yang lebih pendek. Menurut UNDP (1992) pengkajian bencana

adalah proses dari penentuan dampak dari suatu bencana pada suatu masyarakat. Prioritas pertama adalah menetapkan kebutuhan untuk tindakan-tindakan emergensi yang bersifat segera guna menyelamatkan dan melanjutkan kehidupan dari yang selamat. Prioritas kedua adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan pemberian fasilitas dan mempercepat pemulihan dan pembangunan.

Manajemen bencana perlu dilakukan dengan mekanisme internal, yaitu mendudukan masyarakat sebagai subyek. Manajemen ini tidak menempatkan masyarakat pada posisi lemah, bodoh dan salah, nampaknya menjadi suatu kebutuhan. Metode partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendukung mekanisme internal. Asas yang melandasi mekanisme ini adalah “pemberdayaan”, yaitu memperhatikan kapasitas awal masyarakat dan kegiatan dibangun untuk masyarakat agar dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri (Paripurno, 2001).



Gambar 1. Pengaruh karakteristik Personal, Perilaku Komunikasi dan Keragaan Kelompok terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Untuk mengetahui peran komunikasi, pemuka pendapat dalam penanganan bencana ini perlu dilakukan penelitian dengan mengkaji beberapa peubah terkait dengan penelitian. Peubah-peubah yang dimaksud meliputi karakteristik personal pemuka pendapat, perilaku komunikasi pemuka pendapat dan keragaan kelompok sebagai peubah bebas. Peubah tidak bebas adalah pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 1, dapat disusun hipotesis berikut: (1) Karakteristik personal pemuka pendapat berpengaruh nyata terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana, (2) Perilaku komunikasi pemuka pendapat berpengaruh nyata terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana dan (3) Keragaan kelompok masyarakat berpengaruh nyata terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alasan daerah tersebut mengalami kerusakan paling parah dibandingkan kabupaten lainnya. Waktu yang digunakan untuk penelitian selama enam bulan (Maret – September 2007).

3.3. Desain Penelitian

Desain penelitian berupa metode survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Kerlinger

(1996) mengatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari contoh yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

3.4. Populasi dan Contoh

Populasi penelitian adalah pemuka pendapat di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian, antara lain kecamatan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, banyaknya masyarakat yang menjadi korban, lokasi penelitian dapat dijangkau dan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pemberian bantuan dan penanganan bencana. Populasi pemuka pendapat di Kecamatan Sewon, yaitu 455 pemuka pendapat, yang tersebar di empat desa, yaitu di Desa Pendowoharjo 110 orang, Timbulharjo 109 orang, Bangunharjo 119 orang dan Panggungharjo 117 orang. Pengambilan contoh dilakukan dengan teknik *non-probability sampling* yang menggunakan cara purposif. Sampling ini menurut Riduwan (2006) cocok untuk studi kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis. Dalam penelitian ini ditetapkan contoh sebanyak 20% dari populasi yang ada di empat desa di Kecamatan Sewon. Jumlah contoh dalam penelitian ini sebanyak 91 orang pemuka pendapat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Karakteristik Personal Pemuka Pendapat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden antara 21 - 65 tahun, dengan usia rata-rata 41 tahun yang tergolong usia produktif. Sebagian besar responden merupakan umur dengan ke-

adaan di atas usia rata-rata (53,8%). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 69,2% pria dan 30,8% wanita. Keadaan ini menunjukkan bahwa peran kaum perempuan di tengah masyarakat sudah cukup baik. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan semakin terbukanya peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Pendidikan responden terdiri dari SD 5,5%, SLTP 7,7%, SLTA 41,8%, Diploma 14,3% dan Sarjana 30,8%. Kondisi responden yang sebagian besar berpendidikan SLTA sampai sarjana menunjukkan faktor pendidikan mempengaruhi ketokohan seseorang di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Jenis pekerjaan responden yaitu PNS 24,2%, Petani 20,9%, Pegawai Swasta 30,8% dan Wiraswasta 24,2%. Responden yang paling banyak bekerja di sektor swasta seperti pegawai di perusahaan dan instansi swasta. Jumlah petani lebih sedikit karena di lokasi penelitian, petani biasanya berpendidikan relatif lebih rendah dan kurang memiliki akses sebagai pemuka pendapat.

Pendapatan responden berkisar Rp 420.000 - Rp 10.000.000, sehingga diperoleh pendapatan rata-rata Rp 1.629.165, dan jumlah responden yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata 62,6% dan di atas rata-rata 37,4%.

Distribusi menurut ketokohan dalam masyarakat menunjukkan tokoh politik 22,0%, tokoh agama 16,5%, tokoh pemuda 16,5%, tokoh wanita 16,5%, tokoh sosial 16,5% dan tokoh pendidikan (12,1%). Berdasarkan persepsi responden, ada beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran ganda atau memiliki lebih dari satu ketokohan. Namun dalam penelitian ini yang dilihat salah satu ketokohan yang lebih dominan.

4.2. Perilaku Komunikasi

Sebagian besar responden menonton televisi antara 3 – 5 jam dalam satu minggu (49,5%). Respons pemuka pendapat terhadap radio kurang begitu baik, karena sebagian besar responden mendengar radio < 3 jam (48,4%). Namun bagi pemuka pendapat, surat kabar menjadi media penting sebagai sumber informasi karena 74,7% responden membaca surat kabar antara 3 – 5 jam dalam satu minggu.

Sebagian besar responden memanfaatkan media massa untuk menambah pengetahuan, terutama surat kabar yang mencapai 87,4%. Kemudian untuk sarana hiburan umumnya memanfaatkan radio (18,4%), begitu juga untuk mengisi waktu luang (41,4%). Informasi penyaluran bantuan sebagian besar diperoleh dari siaran radio (50%), karena radio lokal secara rutin menyiarkan perkembangan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagian besar diperoleh dari televisi (26,2%). Kemudian surat kabar mempunyai peranan penting dalam menginformasikan kebijakan penanganan bencana (51,9%).

Responden di lokasi penelitian melakukan pertemuan dengan pelaksana penanganan bencana antara 1 - 7 kali dalam satu minggu dengan rata-rata pertemuan 2 kali. Responden sebagian besar melakukan pertemuan kurang dari rata-rata (52,75%) dengan tujuan mencari informasi (59,3%). Tempat berkomunikasi sebagian besar di posko LSM (27,5%). Menurut responden, jadwal pertemuan yang paling efektif adalah hari kerja (51,6%) pada pagi hari antara jam 08.00 – 12.00 (34,1%).

Responden sebagian besar bersikap positif terhadap opini masyarakat (71,4%). Penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah didukung oleh pemuka pendapat (69,2%). Pemuka pendapat juga mendukung penanganan

*Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Gempa Bumi*

bencana oleh LSM (69,2%). Prosedur penanganan bencana di lokasi penelitian dinilai sesuai oleh pemuka pendapat (86,8%) karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Cara penanganan bencana menurut sebagian besar pemuka pendapat lebih baik dilakukan secara langsung (53,8%).

4.3. Keragaan Kelompok

Struktur kelompok menunjukkan, keterlibatan responden dalam pengambilan keputusan di kelompoknya termasuk kategori kuat (66,15%) karena pemuka pendapat mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan di setiap rapat kelompok masyarakat terkait dengan penanganan bencana. Pembagian kerja kelompok juga memiliki skor tinggi (63,95%). Namun komunikasi timbal balik hanya mempunyai skor cukup (58,02%).

Dalam pembinaan kelompok, banyaknya aktivitas dan kesibukan menyebabkan sebagian responden tidak memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok, sehingga partisipasi responden dalam kegiatan kelompok masyarakat hanya memperoleh skor cukup (59,12%). Karena tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelompok, maka responden juga tidak mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap kelompok (56,48%). Namun responden mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kelompok (68,79%).

Karena sering mengadakan pertemuan kelompok masyarakat maka keterbukaan informasi memiliki skor tinggi (75,16%) dalam kekompakan kelompok. Hal ini disebabkan karena dalam rapat-rapat kelompok semua permasalahan dan informasi terbaru dikemukakan, sehingga diketahui oleh semua anggota. Kesamaan kondisi sebagai kor-

ban bencana alam membuat masyarakat bekerjasama bahu-membahu meringankan beban, sehingga kerjasama dalam masyarakat relatif kuat (65,71%). Namun dalam kelompok masyarakat tidak selalu terjadi kesamaan pandangan (54,94%) karena masing-masing individu mempunyai pendapat yang berbeda.

Suasana kelompok menunjukkan, kebebasan berpartisipasi dalam kelompok memiliki skor kuat (65,27%) karena semua anggota dapat berperan dalam kegiatan kelompok, sehingga tingkat motivasi responden tinggi (68,57%), suasana kekeluargaan dan gotong-royong yang dijunjung tinggi oleh kelompok, maka solidaritas memiliki skor kuat (72,30%). Dalam tekanan kelompok, tidak selalu ada penghargaan terhadap yang berbuat baik atau menjadi pahlawan bagi kelompoknya. Hal ini menyebabkan penghargaan dalam kelompok memiliki skor cukup (43,07%), sedangkan persaingan antar anggota kelompok tidak terlalu terlihat di lokasi penelitian (36,48%). Proses hukuman dalam kelompok juga lemah (31,20%) karena masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan.

Tujuan kelompok menunjukkan, keterbukaan tujuan kelompok memiliki skor kuat (64,39%) karena sebagian besar responden yang aktif dalam kegiatan kelompok mengetahui tujuan kelompoknya. Meskipun demikian tidak semua responden mengaku selalu memiliki kesamaan tujuan dengan kelompok (54,94%). Hal ini disebabkan tujuan kelompok ditetapkan berdasarkan suara mayoritas dalam kelompok, sehingga anggota kelompok harus mengikutinya demi solidaritas dan persatuan kelompok. Walaupun terdapat perbedaan, dukungan terhadap tujuan kelompok memiliki skor tinggi (72,74%).

4.4. Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

Dalam penyelamatan korban, komunikasi pemuka pendapat yang memiliki skor tertinggi yaitu pendirian posko bantuan (85,05%) dan koordinasi dengan relawan (83,07%). Komunikasi dalam penyelamatan korban dilakukan dalam pendataan korban dan pencarian bantuan seperti relawan, bantuan medis dan bahan makanan untuk korban bencana. Komunikasi ini penting dilakukan untuk pemerataan distribusi bantuan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan korban bencana melalui posko-posko darurat yang didirikan di lokasi bencana.

Skor tertinggi dalam penyediaan hunian sementara adalah pencarian bantuan (83,07%) dan distribusi bantuan (81,97%) di pengungsian. Proses komunikasi dalam penyediaan hunian sementara dilakukan pemuka pendapat dengan memberikan data jumlah pengungsi dan kebutuhan masyarakat kepada pelaksana penanganan bencana. Komunikasi dilakukan melalui tatap muka di posko pemerintah maupun LSM. Selain tatap muka komunikasi juga dilakukan melalui radio-radio amatir (Orari) yang masih berfungsi di lokasi bencana. Dari penyampaian pesan-pesan pemuka pendapat tersebut, pelaksana penanganan bencana kemudian mengirimkan bantuan berupa tenda-tenda darurat, bahan makanan dan obat-obatan.

Dalam informasi program peran pemuka pendapat sebagai penyampai aspirasi masyarakat (82,63%) dan pentingnya forum komunikasi antara pemuka pendapat, masyarakat dan pelaksana penanganan bencana (82,19%) memiliki skor tertinggi. Proses komunikasi dalam informasi program dilakukan melalui koordinasi sejak tahap perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rapat tersebut pemuka pendapat menampung

aspirasi dari masyarakat korban bencana, kemudian oleh pemuka pendapat disampaikan kepada pelaksana penanganan bencana. Forum komunikasi antara masyarakat, pemuka pendapat dan pelaksana penanganan bencana ini untuk menciptakan komunikasi yang efektif sehingga proses penanganan bencana tepat sasaran dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dalam pelayanan sosial dasar, koordinasi dalam penyediaan layanan sosial dasar (80,87%) dan keterlibatan pemuka pendapat dalam pelaksanaan layanan sosial dasar (79,78%) memiliki skor tertinggi. Komunikasi pada pelayanan sosial dasar dilakukan karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak pasca bencana dan berkewajiban membangun kembali wilayahnya. Pemenuhan kebutuhan itu dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan bantuan dari pihak luar. Berdasarkan koordinasi dengan pemuka pendapat, pelaksana penanganan bencana memberikan bantuan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui pemuka pendapat agar merata dan tepat sasaran.

Keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi mental (81,97%) dan pencarian bantuan rehabilitasi mental (81,75%) menempati skor tertinggi dalam rehabilitasi mental. Komunikasi pada masa rehabilitasi mental dilakukan pemuka pendapat dengan menampung aspirasi masyarakat melalui rapat kelompok masyarakat. Hal itu dilakukan karena bencana mempengaruhi kestabilan jiwa dan mengakibatkan trauma pada diri masyarakat. Pemuka pendapat menampung aspirasi masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan mencari jalan keluarnya. Kegiatan rehabilitasi mental dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, yaitu penceramah agama yang ada di lingkungannya. Apabila sumberdaya lokal tidak mencukupi kemudian

*Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Gempa Bumi*

pemuka pendapat meminta bantuan kepada pelaksana penanganan bencana untuk menyediakan relawan baik itu psikiatris maupun penceramah agama.

Kegiatan pembangunan kembali perumahan, dengan skor tertinggi dalam menciptakan keadilan dalam pembangunan perumahan (83,51%) dan perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat (83,29%). Komunikasi pada tahap pembangunan kembali perumahan berdasarkan program pemerintah yang menetapkan kebijakan pembangunan perumahan kepada korban bencana. Program tersebut kemudian disosialisasikan kepada pemuka pendapat, terutama yang terlibat sebagai fasilitator sosial dan pimpinan kelompok masyarakat di lingkungannya dengan melibatkan fasilitator teknis dan Konsultan Manajemen Kecamatan (KMK). Pemuka pendapat kemudian menyampaikan program tersebut kepada masyarakat melalui rapat kelompok yang dilakukan secara rutin satu kali dalam satu minggu untuk mensinergikan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat, serta pengumpulan data-data kerusakan.

Skor tertinggi perbaikan prasarana dan sarana dasar pada perhatian pemuka pendapat terhadap aspirasi masyarakat (83,07%) serta perencanaan dan koordinasi (79,34%). Komunikasi pada perbaikan prasarana dan sarana dasar dilakukan berdasarkan program pemerintah melalui pelaksana penanganan bencana. Program tersebut kemudian disosialisasikan kepada pemuka pendapat untuk disampaikan kepada masyarakat. Pemuka pendapat yang banyak

dilibatkan biasanya yang aktif di struktur pemerintahan desa.

Sosialisasi dititikberatkan pada teknis perbaikan prasarana dan sarana dasar. Komunikasi antara pelaksana penanganan bencana dengan pemuka pendapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pada pemulihan sistem perekonomian skor tertinggi yaitu dalam hal perhatian terhadap aspirasi masyarakat (81,31%) dan perencanaan (80,43%). Komunikasi pada pembangunan sistem perekonomian dilakukan berdasarkan program pemerintah melalui pelaksana penanganan bencana. Program tersebut kemudian disosialisasikan kepada pemuka pendapat untuk mengetahui besarnya kerusakan fasilitas perekonomian di wilayahnya. Pemuka pendapat yang banyak dilibatkan biasanya yang aktif di struktur pemerintahan desa serta yang bergerak di dunia usaha. Sosialisasi meliputi teknis pemulihan serta pertimbangan pembukaan lapangan usaha bagi masyarakat.

4.5. Pengaruh Karakteristik Personal Pemuka Pendapat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

Hasil uji Khi-kuadrat (χ^2) pada taraf 5% menunjukkan bahwa :

Pekerjaan berpengaruh nyata terhadap pelayanan sosial dasar, pendapatan berpengaruh nyata terhadap informasi program dan ketokohan berpengaruh nyata terhadap pelayanan sosial dasar. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada hasil olahan data Tabel 1.

Tabel 1
Pengaruh Karakteristik Personal Pemuka Pendapat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana di Yogyakarta

PEUBAH BEBAS (X)	PEUBAH TIDAK BEBAS (Y)							
	Penyelamatan Korban	Penyediaan Hunian Sementara	Informasi Program	Pelayanan Sosial Dasar	Rehabilitasi Mental	Pembangunan Kembali Perumahan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar	Pemulihan Sistem Perekonomian
Umur	0,871	0,645	0,217	0,063	0,436	0,223	0,142	0,571
Jenis Kelamin	0,063	0,455	0,461	0,131	0,942	0,134	0,405	0,514
Pendidikan	0,882	0,435	0,060	0,204	0,067	0,064	0,052	0,497
Pekerjaan	0,078	0,188	0,264	0,043*	0,156	0,115	0,343	0,359
Pendapatan	0,570	0,337	0,013*	0,273	0,066	0,167	0,136	0,056
Ketokohan	0,653	0,245	0,396	0,032*	0,798	0,086	0,588	0,247

Ket * = Signifikan pada taraf nyata 0,05

** = Signifikan pada taraf nyata 0,01

Pelayanan sosial dasar merupakan kegiatan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban bencana. Pemuka pendapat yang pekerjaannya semakin baik maka mempunyai kesempatan lebih besar untuk berperan dalam kegiatan tersebut. Pendapatan berpengaruh nyata terhadap sosialisasi informasi program, karena pemuka pendapat yang pendapatannya tinggi mempunyai banyak peluang untuk melakukan sosialisasi informasi program penanganan bencana kepada masyarakat. Keadaan personal responden yang rata-rata memiliki pendapatan tinggi mempermudah akses terhadap informasi.

Seseorang ditokohkan oleh masyarakat antara lain karena kemampuan empati dan partisipasi sosialnya yang lebih besar, sehingga ketokohan berpengaruh nyata terhadap pelayanan sosial dasar. Pelayanan sosial dasar ini dilakukan karena kesadaran pemuka pendapat untuk meringankan penderitaan masyarakat di lingkungannya akibat bencana. Peran tersebut dilakukan karena pemuka pendapat memiliki akses komunikasi dengan pelaksana penanganan bencana.

4.6. Pengaruh Perilaku Komunikasi Pemuka Pendapat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

Hasil uji Khi-kuadrat (χ^2) pada taraf 5% menunjukkan bahwa hanya respons terhadap media massa yang berpengaruh nyata terhadap penyelamatan korban. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Respons terhadap media massa mempunyai pengaruh nyata terhadap penyelamatan korban pasca bencana. Artinya semakin tinggi respons pemuka pendapat terhadap media massa mempengaruhi perannya dalam penyelamatan korban. Hal ini cukup beralasan, karena dalam masa tanggap darurat terutama penyelamatan korban kondisi penuh dengan kepanikan, sehingga dituntut untuk bergerak cepat. Dalam situasi demikian yang dibutuhkan adalah ketanggapan dan sikap manusiawi untuk menyelamatkan masyarakat yang terluka. Kemampuan melakukan penyelamatan korban berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari media massa. Pengetahuan tersebut diperoleh dari siaran media massa yang menampilkan atau menceritakan kegiatan penyelamatan korban, baik melalui berita

*Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Gempa Bumi*

atau film. Efek tersebut kemudian terelakam dan menjadi pengetahuan bagi pe-nyelamatan korban bencana

Tabel 2

Pengaruh Perilaku Komunikasi Pemuka Pendapat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana di Yogyakarta

PEUBA H BEBAS (X)	PEUBAH TIDAK BEBAS (Y)							
	Penyela matan Korban	Penyedi aan Hunian Sementa ra	Informasi Program	Pelayanan Sosial Dasar	Rehabilita si Mental	Pembang unan Kembali Perumaha n Dasar	Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar	Pemulih an Sistem Perekono mian
Respon sTerhada p Media Massa	0,010*	0,133	0,875	0,894	0,622	0,958	0,523	0,240
Intensitas Pertemua n dengan Pelaksana a	0,184	0,054	0,792	0,207	0,699	0,205	0,871	0,846
Sikap terhadap Opini Publik	0,277	0,467	0,739	0,525	0,287	0,287	0,783	0,744

Keterangan: * nyata pada taraf 5% dengan pembanding Asimp. Sig < 0,05, maka tolak Ho (berpengaruh nyata)

4.7 Pengaruh Keragaan Kelompok Masyarakat terhadap Pemberdaya Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

Uji Khi-kuadrat (χ^2) terhadap keragaan kelompok masyarakat dengan pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana menunjukkan banyak pengaruh nyata antara dua peubah tersebut pada taraf 5%. Hasil uji dapat dilihat pada hasil olahan data Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskakan bahwa struktur kelompok masyarakat berpengaruh nyata terhadap penyelamatan korban, penyediaan hunian sementara, pelayanan sosial dasar, pembangunan kembali perumahan dan pemulihan sistem perekonomian. Artinya semakin tinggi struktur kelompok masyarakat, maka semakin berpengaruh terhadap kegiatan penanganan bencana tersebut. Adanya keterlibatan pemuka pendapat dalam pengambilan keputusan

dan pembagian kerja kelompok menyebabkan besarnya peran pemuka pendapat dalam berbagai aktivitas penanganan bencana. Namun karena komunikasi timbal balik dalam kelompok relatif rendah, maka struktur kelompok tidak berpengaruh terhadap informasi program, rehabilitasi mental, serta perbaikan prasarana dan sarana dasar.

Pembinaan kelompok berpengaruh nyata terhadap penyediaan hunian sementara, informasi program, pelayanan sosial dasar, pembangunan kembali perumahan dan pemulihan sistem perekonomian. Besarnya manfaat kegiatan kelompok bagi pemuka pendapat menyebabkan pengaruh terhadap kegiatan penanganan bencana tersebut. Kurangnya partisipasi responden dalam kegiatan dan pengambilan keputusan kelompok menyebabkan pengaruh pembinaan kelompok terhadap rehabilitasi mental dan perbaikan prasarana dan sarana dasar tidak begitu terlihat.

Tabel 3
Pengaruh Keragaan Kelompok Masyarakat terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana di Yogyakarta

PEUBAH BEBAS (X)	PEUBAH TIDAK BEBAS (Y)							
	Penyelamatan Korban	Penyediaan Hunian Sementara	Informasi Program	Pelayanan Sosial Dasar	Rehabilitasi Mental	Pembangunan Kembali Perumahan	Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar	Pemulihan Sistem Perekonomian
Struktur Kelompok	0,023*	0,009*	0,097	0,020*	0,097	0,036*	0,607	0,011*
Pembinaan Kelompok	0,059	0,005*	0,039*	0,007*	0,051	0,004*	0,223	0,031*
Kekompakan Kelompok	0,001*	0,000*	0,001*	0,001*	0,000*	0,000*	0,015*	0,000*
Suasana Kelompok	0,113	0,002*	0,072	0,007*	0,034*	0,003*	0,374	0,004*
Tekanan Kelompok	0,080	0,517	0,051	0,084	0,010*	0,409	0,753	0,077
Tujuan Kelompok	0,089	0,002*	0,301	0,180	0,019*	0,057	0,192	0,203

Ket * = Signifikan pada taraf nyata 0,05

** = Signifikan pada taraf nyata 0,01

Kekompakan kelompok berpengaruh nyata terhadap semua aktivitas penanganan bencana yaitu penyelamatan korban, penyediaan hunian sementara, informasi program, pelayanan sosial dasar, rehabilitasi mental, pembangunan kembali perumahan, perbaikan prasarana dan sarana dasar, serta pemulihan sistem perekonomian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi kekompakan kelompok mempengaruhi pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana. Keadaan demikian terjadi karena tingginya keterbukaan informasi dalam kelompok dan adanya kerjasama yang baik.

Suasana kelompok berpengaruh nyata terhadap penyediaan hunian sementara, pelayanan sosial dasar, rehabilitasi mental, pembangunan kembali perumahan dan pemulihan sistem perekonomian. Tingginya solidaritas dalam kelompok menjadikan suasana kelompok berpengaruh terhadap permasalahan mendasar dalam penanganan bencana tersebut. Hal ini terjadi akibat sikap kekeluargaan yang masih dimiliki oleh masyarakat. Namun demikian, suasana kelompok ini tidak

mempengaruhi hal-hal lain terkait peran pemuka pendapat dalam penanganan bencana, seperti informasi program dan perbaikan prasarana dan sarana dasar.

Tekanan kelompok hanya berpengaruh nyata terhadap rehabilitasi mental. Rendahnya penghargaan dalam kelompok menyebabkan tidak adanya pengaruh nyata terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana. Sedangkan persaingan dan hukuman tidak mempengaruhi penanganan bencana, karena kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela dan karena rasa kekeluargaan masyarakat. Rasa kekeluargaan tersebut menyebabkan peran-peran pemuka pendapat semakin terbuka karena tanpa beban tekanan dalam kelompok.

Tujuan kelompok berpengaruh nyata terhadap penyediaan hunian sementara dan rehabilitasi mental. Tingginya dukungan terhadap tujuan kelompok menyebabkan peran pemuka pendapat dalam kebutuhan mendasar masyarakat tersebut meningkat. Hal itu juga didukung oleh keterbukaan dalam kelompok masyarakat. Meskipun demikian, karena masih ada ketidaksamaan tujuan, maka

*Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana
Gempa Bumi*

kegiatan penanganan bencana lainnya tidak terpengaruh.

4.8. Pengaruh Karakteristik Personal, Perilaku Komunikasi dan Keragaman Kelompok Terhadap Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana

Berdasarkan hasil yang signifikan tersebut kemudian dilakukan analisis tambahan dengan regresi linear berganda untuk memperkuat pentingnya pengaruh peubah ketokohan, intensitas pertemuan dengan pelaksana penanga-

nan bencana dan kekompakan kelompok terhadap peubah penting dalam penanganan bencana seperti penyediaan hunian sementara, informasi program, pelayanan sosial dasar dan pembangunan kembali perumahan dalam bentuk skala interval 1-3. Hasil analisis regresi linear berganda tersebut menunjukkan bahwa ketokohan, intensitas pertemuan dengan pelaksana penanganan bencana dan kekompakan kelompok hanya berpengaruh nyata terhadap penyediaan hunian sementara. Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Pengaruh Ketokohan, Intensitas Pertemuan Dengan Pelaksana Penanganan Bencana dan Kekompakan Kelompok Terhadap Penyediaan Hunian Sementara.

No	Peubah Bebas (X)	Penyediaan Hunian Sementara (Y2)		
		Coef β	Sig.	Annova
1.	Ketokohan (X1.6)	0,183	0,077	F = 4,378 Sig. = 0,006*
2.	Intensitas pertemuan (X2.2)	0,162	0,115	
3.	Kekompakan kelompok (X3.3)	0,285	0,005*	

Keterangan: * signifikan pada taraf nyata 0,05

Tabel 4 menunjukkan bahwa kekompakan kelompok memiliki pengaruh besar terhadap penyediaan hunian sementara dengan nilai nyata 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat korban bencana membutuhkan kekompakan untuk mempercepat proses penanganan bencana. Dalam penelitian ini, kekompakan kelompok mencerminkan rasa keterikatan (memiliki) responden terhadap kelompoknya, sehingga pemuka pendapat bersama masyarakat bekerjasama memulihkan kondisinya, dari korban bencana menjadi masyarakat yang kembali hidup normal. Meskipun tidak semua peubah bebas berpengaruh nyata, tetapi secara bersama-sama ketokohan, intensitas pertemuan dengan pelaksana penanganan bencana dan kekompakan kelompok berpengaruh nyata terhadap penyediaan hunian sementara. Dengan demikian dapat

dijelaskan bahwa bila tokoh masyarakat banyak terlibat dalam penanganan bencana di lingkungannya, kemudian menjadi fasilitator sosial dan kompak dengan kelompoknya maka proses penanganan bencana dilingkungannya relatif lebih cepat dan berhasil.

5. Simpulan Dan Saran

5.1. Simpulan

1. Usia pemuka pendapat merupakan usia produktif dengan perbandingan persentase pria dan wanita cukup representatif. Sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta dengan tingkat pendidikan dan rata-rata pendapatan cukup tinggi. Berdasarkan keaktifan dan partisipasinya di masyarakat, ketokohan yang banyak berperan yaitu tokoh sosial.

2. Pemuka pendapat merespons media massa antara 3 – 5 jam dalam satu minggu dengan tujuan menambah pengetahuan dan mendapatkan informasi kebijakan penanganan bencana, dan rataan komunikasi dengan pelaksana penanganan bencana dua kali dalam satu minggu untuk mencari informasi. Pemuka pendapat merespons positif opini yang berkembang di masyarakat serta mendukung penanganan bencana yang dilakukan pemerintah dan LSM. Prosedur penanganan bencana dianggap sudah sesuai, namun mereka lebih memilih penyaluran bantuan langsung dengan alasan lebih tepat sasaran.
3. Keragaan kelompok memiliki rataan skor tinggi, terutama kekompakan kelompok, suasana kelompok dan tujuan kelompok. Kondisi ini menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat sangat penting untuk mendukung kegiatan penanganan bencana.
4. Pemuka pendapat banyak terlibat dalam komunikasi penanganan bencana. Hasil analisis pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana memiliki rataan skor tinggi. Faktor komunikasi yang berperan yaitu sebagai komunikator dan komunikasi bagi pelaksana penanganan bencana dan masyarakat sesuai dengan perannya dalam kegiatan penanganan bencana. Kondisi ini menunjukkan peran komunikasi pemuka pendapat diperlukan dalam penanganan bencana, karena dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan program pelaksana penanganan bencana.
5. Pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana dipengaruhi oleh keragaan kelompok masyarakat. Peubah karakteristik personal dan perilaku komunikasi pemuka pendapat memiliki banyak peubah yang tidak berpengaruh nyata.

Namun secara bersama-sama peubah penting dalam penanganan bencana seperti ketokohan, intensitas pertemuan dengan pelaksana penanganan bencana dan kekompakan kelompok berpengaruh terhadap penyediaan hunian sementara.

5.2. *Saran*

1. Komunikasi pemuka pendapat harus diberdayakan dalam setiap kegiatan penanganan bencana, karena pemuka pendapat banyak berperan dan memperlancar proses penanganan bencana. Peran pemuka pendapat tersebut bagi masyarakat sebagai sumber informasi serta penghubung aspirasi masyarakat kepada pelaksana penanganan bencana. Sebaliknya bagi pelaksana penanganan bencana, pemuka pendapat sebagai sumber informasi untuk pertimbangan penentuan kebijakan pelaksanaan penanganan bencana serta menyampaikannya kepada masyarakat.
2. Melihat sering terjadinya bencana alam di Indonesia, sebaiknya pemerintah maupun LSM yang memiliki program penanganan bencana dapat berkomunikasi dengan pemuka pendapat, agar program penanganan bencana tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Untuk melaksanakan manajemen komunikasi penanggulangan bencana yang efektif perlu didukung manajemen organisasi penanggulangan bencana partisipatif yang bersifat struktural, operasional dan koordinatif. Manajemen organisasi dan komunikasi penanggulangan bencana tersebut harus dirancang dengan melibatkan masyarakat melalui pemuka pendapat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

- Arga, D. 2006. *Quo Vadis Kebijakan Penanganan Bencana Yogyakarta*. Dokumen <http://www.walhi-jogja.or.id>. Akses 15 Desember 2006.
- Bappenas. 2006. *Sistem Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Gempa di Provinsi DIY-Jateng*. Presentasi Direktorat Kewilayahan II Bappenas, Jogja, 14 Juli 2006.
- BPS Kabupaten Bantul, 2006. *Bantul dalam Angka 2005*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- BRR NAD-Nias, 2005. *Meletakkan Fondasi Membangun Harapan. Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*. BRR NAD-Nias, Banda Aceh.
- Effendy, O. U. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____. 2004. *Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hubeis, A.V.S. 2001. *Tantangan dan Prospek Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Otonomi Daerah*. dalam Prosiding Seminar Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- IDEP. 2005. *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Bali: Yayasan IDEP.
- Kerlinger, F. N. 1996. *Asas-asas Penelitian Behavioral* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, D. 2002. *Ilmu Komunikasi. Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2005. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Paripurno, E. T. 2001. "Manajemen Bencana Berbasis Komunitas: Seperti Apa ?" Bahan Diskusi pada Loklatih Manajemen Bencana Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tanggal 30 – 31 Januari 2001.
- Pemda DIY. 2006. *Info Gempa DIY*. Dokumen <http://www.pemda-diy.org>. Akses 15 Desember 2006.
- Prasetyo, H. 2004. *Manajemen Bencana*. Dokumen <http://www.walhi.or.id>. Akses 21 Nopember 2006.
- Riduwan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rogers, E. M. dan F. F. Shoemaker. 1981. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru* (Terjemahan). Surabaya: Usaha Nasional.
- Rozaki, A. 2007. *APBD Partisipatif Pascagempa*. Dokumen <http://www.ireyogya.org>. Akses 2 Januari 2007
- Setiana, L. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setyowati, Y. 2005. *Komunikasi Partisipatif: Pendekatan Pengembangan Masyarakat*. Dalam *Komunikasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: AMPD Press.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryo, R. 2005. *Komunikasi Bencana*. *Harian Kedaulatan Rakyat*, Selasa 4 Januari 2005.
- Tubbs, S. L. dan S. Moss. 2001. *Human Communication: Konteks-konteks Komunikasi* (Terjemahan). Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen DPR RI. [Http://www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Akses 27 Desember 2007.

UNDP. 1992. *Tinjauan Umum Manajemen Bencana*. Modul Pelatihan Manajemen Bencana
UNDP/UNDRO, Jakarta.

Wuryantari, T. 2005. *Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana* (Terjemahan). Jakarta: MPBI.